

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, Kekuasaan bangsawan dalam politik lokal di Kabupaten Bone tahun 2013-2018. Adapun Kekuasaan bangsawan dalam Politik Lokal akan dianalisis dengan teori Habitus dan *field* (arena) dengan melihat habitus dan arena yang dilakukan oleh bangsawan dalam mempertahankan kekuasaan di Kabupaten Bone. Kemudian kekuasaan bangsawan akan dianalisis terkait modal yang dimiliki bangsawan dalam kontestasi politik, yaitu modal sosial, modal simbolik, modal kultural dan modal ekonomi.

5.1 Kekuasaan Bangsawan dalam Perspektif Habitus

Kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone telah bertahan sejak zaman kerajaan, bahkan setelah menyerahkan kekuasaan kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaum bangsawan masih tetap bertahan meskipun harus mempertahankan kekuasaan dengan ikut dalam pesta demokrasi. Kontestasi politik yang terjadi di Kabupaten Bone merupakan pertarungan kekuatan politik yang selalu memenangkan kalangan bangsawan. Kekuasaan bangsawan yang terus berlanjut sampai di era demokrasi ini menjadikan eksistensi bangsawan menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga hal ini tentu saja perlu dianalisis dari perspektif habitus untuk mengkaji lebih dalam tingkah laku dan pola hidup bangsawan serta kepemimpinan bangsawan yang telah berkuasa sejak masa tradisional sampai zaman politik modern.

5.1.1 Kebiasaan dalam Mendapatkan dan Mempertahankan Kekuasaan Pada Masa Tradisional Hingga Politik Modern

Sejak zaman Kerajaan Bone, bangsawan telah mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat bone, Raja sebagai kepala negara di Kerajaan Bone saat itu harus berasal dari keturunan bangsawan Tingkat 1 atau disebut putra mahkota. Pada Zaman Kerajaan, sistem yang berlaku adalah tatanan hukum adat dimana semua bentuk peradaban-peradaban dan keputusan ditentukan oleh menteri dalam kabinet kerajaan yang disebut adat 7 (tujuh) atau ade' pitue. Raja yang akan memimpin kabupaten bone akan dipilih oleh ade' pitue (adat tujuh) yang dipimpin oleh ketua ade' pitue yang disebut to marilaleng. Para putra mahkota yang telah dipilih oleh ade' pitue akan ditempatkan di distrik distrik kekuasaan kerajaan Bone, kemudian setelah teruji kepemimpinannya, akan diangkat menjadi Raja Bone. Zaman berganti, pada tanggal 20 juni 1950 terjadi penyerahan kedaulatan kerajaan Bone ke Republik Indonesia dan bergantilah menjadi Kabupaten Bone.

Setelah berubah dari Kerajaan Bone menjadi Kabupaten Bone, kepemimpinan bangsawan masih berlanjut sampai adanya pemilihan langsung oleh masyarakat secara demokratis dalam Pilkada yang dimulai tahun 2008 sampai sekarang. Kekuasaan bangsawan dalam Pilkada dianggap sebagai hal yang wajar oleh Lembaga Adat Kabupaten Bone karena sebagian masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan budaya penghargaan terhadap keturunan Arung atau Bangsawan. Seperti yang diungkapkan oleh Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara Perwakilan Kabupaten Bone yakni :

Bone punya darah kental, namanya keturunan tomanurung dan peradaban bugis sehingga masih ada jati diri yang masih melekat para pemilih rata-rata masih turunan kerajaan masa lalu. Kemudian di Bone masih kental adat istiadat sebagai bekas pemegang hegemoni dan pusat budaya bugis, sehingga para pemilih yang dari dulu berada di Bone, masih tertanam dihatinya bahwa keturunan, kebiasaan dan tingkah laku bangsawan masih sangat diperhitungkan dalam kontestasi pilkada. (Wawancara dengan Dr. H. Andi Yushand Tenritappu, MFA, Pada 30 September 2019 Pukul 11.30 WITA)

Hal ini menunjukkan bahwa Habitus kepemimpinan Bangsawan dari Masa Traditional sampai pada politik modern merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat sehingga bangsawan selalu menjadi pemegang kekuasaan di Kabupaten Bone.

Tabel 5.1
Daftar Nama Kepala Daerah dan Bupati di Kabupaten Bone 1951-2018

No	Nama	Periode		Ket	Status
1	Andi Abdul Rachman Daeng Mangung	1951	1951	Kepala Afdeling	Bangsawan
2	Andi Pangerang Daeng Rani	1951	1955	Kepala Afdeling	Bangsawan
3	Andi Ma'mun Daeng Mattiro	1955	1957	Kepala Daerah	Bangsawan
4	H. Andi Mappanyukki	1957	1960	Kepala Daerah	Bangsawan
5	Andi Suradi	1960	1966	Kepala Daerah	Bangsawan
6	Andi Djamuddin (Penjabat)	1966	1966	Plt. Kepala Daerah	Bangsawan
7	Andi Tjatjo (Pelaksana tugas)	1966	1967	Plt. Kepala Daerah	Bangsawan
8	Andi Baso Amir	1967	1969	Kepala Daerah	Bangsawan
9	H. Suaib	1969	1976	Kepala Daerah	Non Bangsawan
10	H. P.B. Harahap	1976	1982	Kepala Daerah	Non Bangsawan
11	H. Andi Madeali (Penjabat)	1982	1983	Plt. Kepala Daerah	Bangsawan
12	Andi Syamsu Alam	1983	1988	Kepala Daerah	Bangsawan
13	Andi Syamsoel Alam	1988	1993	Kepala Daerah	Bangsawan
14	Andi Muhammad Amir	1993	1998	Kepala Daerah	Bangsawan
		1998	2003		
15	H. Andi M. Idris Galigo	2003	2008	Bupati Bone	Bangsawan
		2008	2013		

16	Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si.	18 April 2013	18 April 2018	Bupati Bone	Bangsawan
17	Ir. Andi Bakti Haruni CES	13 Februari 2018	26 September 2018	Plt. Bupati Bone	Bangsawan
18	Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si.	2013	<i>Sekarang</i>	Bupati Bone	Bangsawan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan Bangsawan di Bone memang sangat dominan, hanya ada dua person yang tidak berasal dari non Bangsawan yaitu H. Suaib dan P.B Harahap yang kala itu masih dipilih oleh DPRD. Namun saat P.B Harahap menjabat, beliau dibunuh secara sadis oleh sopirnya sendiri, sehingga menjadikan persepsi masyarakat kian sulit menerima kepemimpinan non bangsawan di Kabupaten Bone, seperti yang diungkapkan oleh Pemerhati Budaya Kabupaten Bone yakni :

Semenjak kematian PB Harahap tidak ada lagi bupati yang berasal bukan dari kalangan bangsawan yang mempunyai gelar Andi karena ada anggapan bahwa daerah bone ini kultur sosialnya masih kuat adatnya masih kental, dan ditakutkan ada masalah lagi ketika bukan dari kalangan bangsawan Bone yang memimpin, kemudian dizaman demokrasi ini masyarakat asli Bone itu masih sangat memperhitungkan Garis keturunan yang akan dipilih sebagai pemimpin, yang harus punya darah bangsawan (Wawancara dengan Andi Baso Batara, Budayawan dan Pemerhati Budaya Bone, 4 September 2019 Pukul 11.30)

Catatan hitam kepemimpinan PB Harahap sebagai kalangan non bangsawan Bone kala itu menjadikan masyarakat semakin percaya bahwa yang harus menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bone adalah dari kalangan bangsawan sehingga sampai saat ini dominasi bangsawan masih sangat kuat dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Bone. Sesuai dalam teori Pierre Boedriau bahwa

habitus itu bertahan lama yang menghasilkan legitimasi untuk memilihnya kembali.

Kebiasaan Bangsawan dalam Mempertahakan kekuasaan sebagaimana dalam kepemimpinannya mempunyai dasar prinsip yang disebut prinsip lontara. Prinsip lontara ini menjadi sesuatu yang harus dipegang teguh oleh bangsawan yang memimpin di Kabupaten Bone. Prinsip yang menjadi kebiasaan pemimpin bangsawan inilah yang mendapat apresiasi dan wujud interaksi antar person di Wilayahnya sebagaimana Bangsawan berbicara, bertingkah laku dan menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan fungsi habitus yang landasan atau pijakan individu dalam beraksi atau melakukan tindakan berdasarkan apa yang dipahami, diketahui oleh kepala atau pemikiran yang dipengaruhi lingkungannya dan berdasar pada pengalaman yang dialaminya. Prinsip Bangsawan dalam memimpin berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Bone, Andi Fashar Padjalangi sebagai berikut:

“Dalam memimpin tentu saja perlu karakter yang kuat, historis kepemimpinan bangsawan di Kabupaten Bone punya pengaruh kuat dalam menjalankan pemerintahan, seperti prinsip lontara yang tetap menjadi acuan dasar dalam kepemimpinan dalam pemerintahan di Kabupaten Bone” (Wawancara dengan Bupati Bone, 4 Oktober 2019, Pukul 09.00)

Tabel 5.2

Prinsip Lontara yang menjadi Kebiasaan Kepemimpinan Bangsawan

No.	Lontara Bugis	Arti
1	Lempu'	Jujur
2	Getteng	Teguh
3	Ada Tongeng	Berkata Jujur
4	Teng Mappasilaineng	Tidak membeda-bedakan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Habitus yang terbangun dalam mempertahankan kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone memang punya eksistensi yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dari masa tradisional sampai dengan politik modern dalam perspektif habitus adalah bangsawan memperlihatkan kepemimpinan yang mendapat legitimasi oleh masyarakat dengan prinsip lontara yang masih dipegang teguh oleh pemimpin dari kalangan bangsawan sampai sekarang.

5.1.2 Pola dan Tingkah Laku Bangsawan

Keturunan bangsawan sejak kecil telah terdidik untuk disiapkan sebagai seorang pemimpin. Mulai dari pola dan tingkah laku para bangsawan diharuskan mengikuti karakter kepemimpinan dari pendahulunya sebagai bentuk habitus dengan mata rantai yang tidak terputus dari masa ke masa. Sebagai bentuk habitus yang melekat pada diri seorang bangsawan, karakter yang dibentuk adalah berawal dari pendidikan keluarga yang masih melekat budaya bugis yang kuat sehingga para keturunan bangsawan mempunyai kepribadian yang bijak dan bisa mengayomi sesama. Sebagai manusia bugis dengan darah bangsawan kemudian mempunyai slogan “Taro ada, taro gau” yang artinya adalah satu kata satu perbuatan, jadi setiap perbuatan akan sejalan dengan apa yang telah dikatakan/dijanjikan. Berikut hasil wawancara dengan Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara Perwakilan Kabupaten Bone :

Pola kepemimpinan bangsawan telah diberikan secara turun temurun, mulai dari zaman kerajaan sampai zaman demokrasi, eksistensi bangsawan masih terlihat karena bangsawan punya penurunan potensi memimpin dari generasi ke generasi, sehingga tak heran jika baik dalam birokrasi maupun di legislatif masih didominasi oleh keturunan bangsawan. (Wawancara dengan Dr. H. Andi Yushand Tenritappu, MFA, Pada 30 September 2019 Pukul 11.30 WITA)

Hal senanda juga disampaikan Andi Baso Batara, Pemerhati budaya dan tokoh masyarakat Kabupaten Bone, hasil wawancaranya sebagai berikut :

Keturunan bangsawan punya pola dan tingkah laku yang harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sejak dulu, dalam memimpin polanya diturunkan dari orang tua ke anaknya, dan terbukti selama ini keturunan bangsawan masih sangat dihargai sebagai pewaris keturunan tomanurung. (wawancara dengan Andi Baso Batara 4 September 2019 Pukul 11.30 WITA)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola dan tingkah laku bangsawan harus sesuai dengan ketentuan adat yang diturunkan menjadi nilai dan norma yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahawa Teori habitus yang dipelopori oleh Pierre Boerdiau sesuai dengan apa yang terjadi dalam golongan bangsawan di kabupaten bone yaitu Keturunan bangsawan mempunyai pikiran dan pemahaman yang telah meresap dalam dirinya harus benar-benar diperhatikan karena kebiasaan dan ciri khas yang melekat pada diri bangsawan akan sangat diperhitungkan oleh masyarakat umum.

Meskipun telah menjadi pola dan tingkah laku yang khas seorang bangsawan, habitus masih bisa berubah, namun tetap akan disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan bangsawan. Habitus yang disesuaikan oleh bangsawan adalah adanya penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hal tersebut tercermin dari usaha yang dilakukan bangsawan dalam meningkatkan tingkat pendidikan sebagai wujud dari penyesuaian dalam persiapan untuk menjadi seorang pemimpin.

Pendidikan itu penting, semua orang pasti ingin memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga selagi kita mampu untuk selalu belajar , maka kita selalu prioritaskan supaya kita sebagai pemimpin harus punya intelegensi yang mumpuni sebagai tuntutan zaman yang semakin modern. (wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi, 4 Oktober 2019 Pukul 8.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa habitus yang dibangun oleh bangsawan bukan sekedar mempertahankan ciri khas yang melekat pada individunya, namun tetap melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa habitus para bangsawan punya pola dan tingkah laku untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dipersiapkan dari generasi ke generasi.

Habitus	
	Keturunan Bangsawan Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dari masa tradisional sampai dengan politik modern dalam perspektif habitus adalah bangsawan memperlihatkan kepemimpinan yang telah mendapat legitimasi oleh masyarakat dengan prinsip lontara yang masih dipegang teguh oleh pemimpin dari kalangan bangsawan sampai sekarang
	Habitus para bangsawan punya pola dan tingkah laku yang menjadi ciri khas untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dipersiapkan dari generasi ke generasi. Pola dan tingkah laku tersebut berasal dari hasil didikan keluarga bangsawan yang masih memegang teguh adat istiadat di Kabupaten Bone

5.2 Kekuasaan Bangsawan dalam Perspektif Arena

Konsep Arena tidak terlepas dari konsep habitus karena konsep habitus tidak dapat bekerja jika tidak adanya arena. Konsep arena (*field*) adalah kunci yang menentukan kekuasaan di arena kuasa pada lingkungan masyarakat karena kepentingan politik tentunya mengharuskan para aktor untuk menentukan arena atau wilayah yang akan dijadikan tempat perjuangan untuk mewujudkan tujuan politiknya yaitu memperoleh kekuasaan dan mendominasi sebuah wilayah .

Konsep Arena dipopulerkan oleh Bourdieu merupakan sebuah tempat atau arena sosial dimana elit politik berlomba-lomba menyusun berbagai rencana dan strategi perjuangan untuk memporel sumber daya yang diinginkan berupa wujud kekuasaan yang telah mendapat legitimasi. Konsep arena mempunyai

beberapa indikator analisis yang telah disusun oleh peneliti diantaranya, Pilkada, Patronase Birokrasi, Patronase Partai Politik, dan Sistem Politik. Indikator tersebut adalah cerminan dari semua kegiatan politik dalam arena kontestasi perebutan kekuasaan.

5.2.1 Arena Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung menjadi historis baru dalam dinamika politik lokal, Kabupaten Bone pertama kali mengikuti pilkada yaitu pada tahun 2008, dan telah berlanjut pada tahun 2013 dan terakhir di 2018. Dinamika politik yang terjadi hanya dikalangan bangsawan karena calon yang ikut dalam Pilkada semua berasal dari kalangan bangsawan atau yang mempunyai gelar “Andi”.

Kontestasi Pilkada di Kabupaten Bone selalu memunculkan bangsawan sebagai pemenang, dan calon bupati yang terpilih pasti diusung oleh Partai Golkar. Fenomena tersebut tentu saja bukan sebuah kebetulan karena telah berlangsung sejak lama. Golkar sebagai partai yang berkuasa di Kabupaten Bone mempunyai dominasi yang kuat dalam Pemilu maupun Pilkada, calon bupati yang diusung pasti dari kalangan Bangsawan yang bergelar Andi. Alasan partai Golkar selalu memunculkan bangsawan sebagai calon karena bangsawan memiliki basis yang kuat dalam pemerintahan yang sudah berlangsung sejak lama, kemudian kader partai sudah di dominasi oleh kalangan bangsawan dari zaman sebelum reformasi dan masih eksis sampai saat ini.

Arena PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Bone di Tahun 2018 hanya menghasilkan sepasang calon tunggal dalam kontestasi politik.

Seluruh partai politik menyatakan dukungan kepada petahana yaitu Andi Fashar Padjalangi. Hal tersebut dianggap wajar oleh para pengurus partai, karena yang dicalonkan harus punya nilai dan pengaruh dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut di ungkapkan oleh pengurus Partai Golkar Kabupaten Bone saat wawancara yaitu sebagai berikut :

Pencalonan itu adalah hal yang wajar, karena siapa yang bisa diterima oleh masyarakat, maka itu yang dicalonkan, apalagi Andi Fashar sebagai petahana dan punya pengabdian yang luar biasa di Kabupaten Bone, sehingga kami dari partai Golkar tentu pilihannya tertuju pada petahana. apalagi, beliau adalah kader Golkar yang sejak lama sudah mengabdikan, dan punya trek rekor yang baik dalam pemerintahan. (Wawancara dengan Firman Batari, Sekertaris Umum Golkar Kabupaten Bone 30 September 2019 Pukul 8.30 WITA)

Kemudian Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Bone juga menjelaskan tentang pencalonan Andi Fashar melawan kotak kosong :

Partai demokrat pada saat Pilkada 2018 memang mendukung penuh pencalonan Andi Fashar, karena beliau memang calon terbaik dan sebagai petahana yang baik dalam memimpin, saya sebagai orang yang kuat dalam partai dan punya status bangsawan pun diminta untuk memuluskan langkahnya dan saya nanti di Tahun 2023 baru punya giliran menjadi calon” (wawancara dengan Andi Suaedi, Pengurus Partai Demokrat 7 Oktober 2019 Pukul 19.30 WITA)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Andi Fashar sebagai Petahana dan Punya Status Bangsawan menjadi kunci kemenangannya dalam kontestasi Pilkada. Ada transaksi politik yang terjadi saat pencalonan dimana Andi Suaedi yang punya basis konstituen yang kuat dari Partai Demokrat secara terbuka mengatakan bahwa dirinya tidak mencalonkan karena adanya permintaan khusus dari Andi Fashar. Kemudian Partai politik sebagai kendaraan Andi Fashar meraih kemenangan dalam kontestasi juga menganggap bahwa hasil pilkada yang memenangkan petahana adalah buah dari kepemimpinan Andi Fashar selama ini.

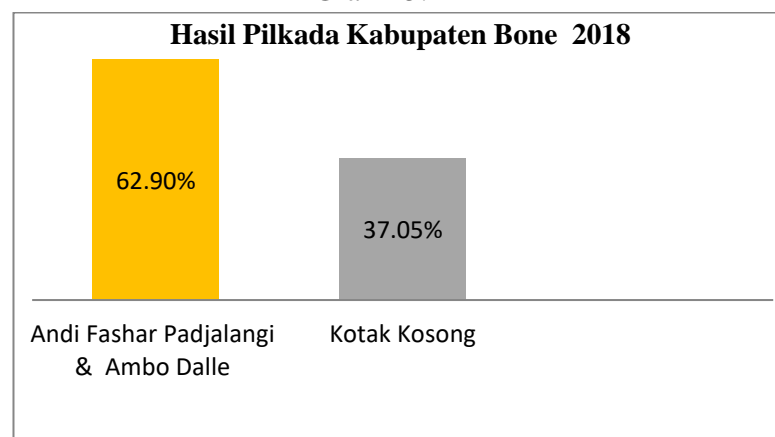
Arena Pilkada memang diharapkan melahirkan pemimpin yang dapat menjadi panutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kontestasi pilkada Kabupaten Bone yang terjadi di 2018 dengan calon tunggal membuktikan bahwa pilihan masyarakat sesuai dengan calon tunggal yang dipilih oleh semua partai yang ada di Kabupaten Bone. Calon Bupati dari kalangan Bangsawan yaitu Andi Fashar Padjalangi bertarung dengan Kotak Kosong, yang apabila kotak kosong tersebut menang maka dilaksanakan Pilkada ulang. Namun ternyata dalam kenyataannya Bangsawan masih dipercaya oleh masyarakat, sebanyak 62,90% Suara yang dimiliki oleh Andi Fashar Padjalangi dan Ambo Dalle dalam kontestasi pilkada mampu menantarkannya kembali memimpin Kabupaten Bone selama 5 (lima) Tahun.

Tabel 5.3
Data PILKADA Kabupaten Bone Tahun 2018

No.	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Akhir Suara	Persentase (%)
1.	Tafadal	232.961	62,90%
2.	Kotak Kosong	137.136	37,05%
	Total	370.097	100%

Sumber: KPUD Kabupaten Bone

Grafik 5.1



Sumber : KPUD Kabupaten Bone

Dari data diatas dapat dapat dilihat bahwa pilhan rakyat Bone masih dominan ke Bangsawan, yaitu Andi Fashar Padjalangi. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa bangsawan masih menjadi pilihan masyarakat. Karena seandainya masyaraat sudah jenuh dan ingin pemimpin baru dari kalangan non bangsawan, bisa jadi dukungan beralih ke kotak kosong sebagai bentuk gerakan sosial baru, tetapi perolehan suara calon dari bangsawan masih jauh dominan terhadap perolehan suara kotak kosong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Arena Pilkada masih dikuasai oleh bangsawan, baik dari segi jaringan partai politik sebagai kendaraan menuju kontestasi maupun pilihan masyarakat yang menjadi legitimasi kepercayaan terhadap kekuasaan.

5.2.2 Patronase Birokrasi

Birokrasi Merupakan pemerintahan yang berjalan dibawah kendali suatu biro yang sering disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (the executive organs of government), dan keseluruhan pejabat publik, baik itu pejabat tinggi ataupun rendah dalam sebuah daerah. Patronase seringkali menjadi hal yang tak terlepas dalam menentukan pejabat birokrasi. Pejabat yang diangkat pasti punya pengaruh untuk keberlangsungan kekuasaan incumbent.

Birokrasi jika dilihat dari sudut pandang Hegel dan Karl Max, ada perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Hegel, Masyarakat dominan terhadap kepentingan umum dan negara seharusnya mewakili kepentingan publik, sedangkan dari sudut pandang Karl Max menyebutkan bahwa negara bukan untuk mewakili kepentingan publik namun kepetingan khusus yang seharusnya diwakilkan dengan kekuatan dominan. Sehingga muncullah sudut padang yang

pro dan kontra terhadap netralitas birokrasi. Hegel mengemukakan bahwa birokrasi harus netral sedangkan Karl Max tak seharusnya netral karena sebuah birokrasi berada dalam instruksi kelas yang dominan.

Birokrasi tak bisa dilepaskan dengan pengaruh praktek politik yang berkembang dalam sebuah pemerintahan. Struktur Birokrasi yang tersusun di Kabupaten Bone mengalami beberapa perubahan setelah Pilkada 2013 dan 2018. Pasca Pilkada 2013 di Kabupaten Bone, Bupati terpilih, yaitu Andi Fashar Padjalangi melakukan beberapa mutasi dalam struktur birokrasinya, sebanyak 8 orang dimutasi ke jabatan yang baru. Perubahan tersebut tentu saja untuk menunjang keberhasilan kepemimpinan Bupati terpilih.

Tabel 5.4
Daftar Nama Pejabat yang mendapat Jabatan Baru pasca pilkada 2013

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Andi Herman SH,MH	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah	Bangsawan
2	Drs. Sudirman S.St., M.Si	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas PU dan SDA	Non Bangsawan
3	Drs. Andi Aswar	Staf Khusus Sekertaris Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Bangsawan
4	Drs. Rosalin Hab. S.Sos, M.Si	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pendidikan	Non Bangsawan
5	Drs. H. Syarifuddin	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan	Non Bangsawan
6	Drs. Asiswa Karim	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Perhubungan	Non Bangsawan
7	Drs. Andi Fajaruddin, MM	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bangsawan
8	Ir. Wahidah M.Si	Sekertaris Dinas PU dan SDA	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Non Bangsawan

Sumber : diolah oleh peneliti 2019

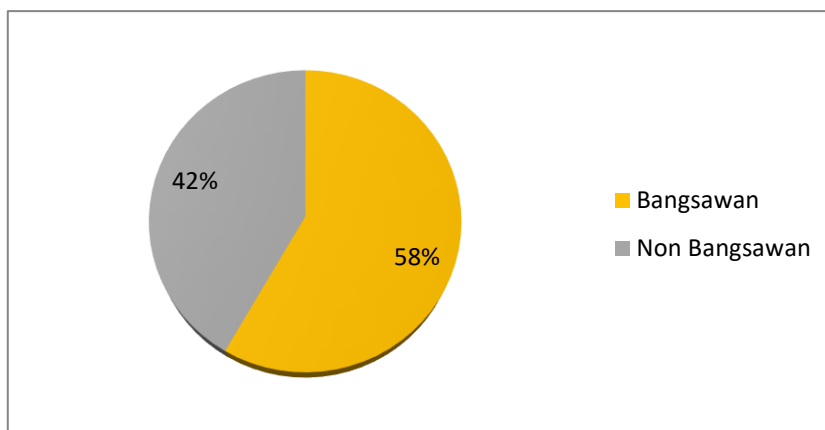
Tabel 5.5
 Nama-Nama Yang Menjabat Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Sekertaris Daerah Pasca
 Pilkada 2013

No	Nama	Jabatan	Status
1	Andi Surya Darma	Sekretaris Daerah	Bangsawan
2	Drs. Rosalin Hab. S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan	Non Bangsawan
3	Andi KAsma PAdjalangi	Kepala Dinas Kesehatan	Bangsawan
4	Drs. Sudirman S.St., M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Non Bangsawan
5	H Askar	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Non Bangsawan
6	Drs. H. Syarifuddin	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Non Bangsawan
7	Muhammad Jafar	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Non Bangsawan
8	Andi Saharuddin	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Bangsawan
9	H Ruslan	Kepala Dinas Sosial	Non Bangsawan
10	Andi Fatmawati	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bangsawan
11	Andi Arsal Ahmad	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Bangsawan
12	Ir. Asmar, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Non Bangsawan
13	Andi Darmawan Paelori	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bangsawan
14	A. Arsyad, SH, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bangsawan
15	Drs. Chaerul Saleh, SE,MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Non Bangsawan
16	Drs. Andi Fajaruddin, MM	Kepala Dinas Perhubungan	Bangsawan
17	Drs. Andi Amran, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Bangsawan
18	Drs. Andi Aswar	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bangsawan
19	Drs. Andi Akbar, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bangsawan
20	Andi Pirdaus	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bangsawan
21	H. Andi Promal Pawi, ST, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan	Bangsawan
22	Drs. H.A. Pahrum Pawi, M.T.P.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bangsawan
23	Ir. Wahidah M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Non Bangsawan
24	Andi Ikhwan	Kepala Dinas Pariwisata	Bangsawan

	Burhanuddin,S.H.,M.Si		
25	Sunardi Nurdin	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan	Non Bangsawan
26	H Andi Aris Handono	Kepala Dinas Peternakan	Bangsawan
27	H Sumardi	Kepala Dinas Perdagangan	Non
28	Andi Aswar	Kepala Dinas Perindustrian	Bangsawan
29	Alimuddin Massapa	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Non
30	Andi Abu Bakar	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bangsawan
31	Andi Fajaruddin	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bangsawan
32	Andi herman	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Bangsawan
33	Andi Islamuddin	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bangsawan
34	Andi Ansar Amal	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bangsawan
35	Bahari Kadir	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Non Bangsawan
36	Dry Fibrianto	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Bangsawan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Gambar 5.2
 Persentase Jumlah Bangsawan dalam Jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Sekertaris Daerah Pasca Pilkada 2013



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Birokrasi kemudian mengalami perubahan kembali pasca kontestasi pilkada 2018, Petahana yang kembali terpilih untuk periode ke dua melakukan

perombakan di jabatan struktural eselon II, sebanyak 16 orang mendapatkan jabatan baru dalam birokrasi. Pola perubahan yang terjadi dalam tubuh birokrasi selalu terjadi pada saat pasca pilkada, hal tersebut tentu saja sangat bersifat politis karena perombakan tubuh birokrasi selalu terjadi saat pasca kontestasi pilkada yang terjadi di Kabupaten Bone.

Tabel 5.6
Daftar Nama Pejabat yang mendapat Jabatan Baru pasca pilkada 2018

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	H A Islamuddin	Kepala BKPSDM	Kepala Inspektorat	Bangsawan
2	A Fajaruddin	Kepala BPKAD	BKPSDM	Bangsawan
3	H A Promal Pawi	Kepala Dinas Kebudayaan	Kepala Dinas Sosial	Bangsawan
4	Asiswa Karim	Kepala Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Non Bangsawan
5	Ir Khalil Sihab	Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, J	Kepala Dinas Perindustrian.	Non Bangsawan
6	A Ikhwan Burhanuddin	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.	Bangsawan
7	H Baharuddin	Staf Ahli Bupati	Kepala Dinas Koperasi	Non Bangsawan
8	A Yusuf	Kepala Dinas Koperasi	Kepala Dinas PSDA	Bangsawan
9	Hj A Syamsiar	Staf Ahli Bupati	Kepala Dinas Pendidikan	Bangsawan
10	Hj A Nurmalia	lama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Litbang	Bangsawan
11	A Ansar Amal	Kepala Balitbangda	Kepala Dinas Kebudayaan	Bangsawan
12	A Syahrul	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Bangsawan
13	A. Alimuddin Massappa	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga	Bangsawan
14	Asmar Arabe	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Staf Ahli Bidang Sosial	Non Bangsawan
15	A Pirdaus	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Bangsawan
16	Chaerul Saleh	jabatan lama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Perdagangan	Non Bangsawan

Sumber : diolah oleh peneliti, 2019

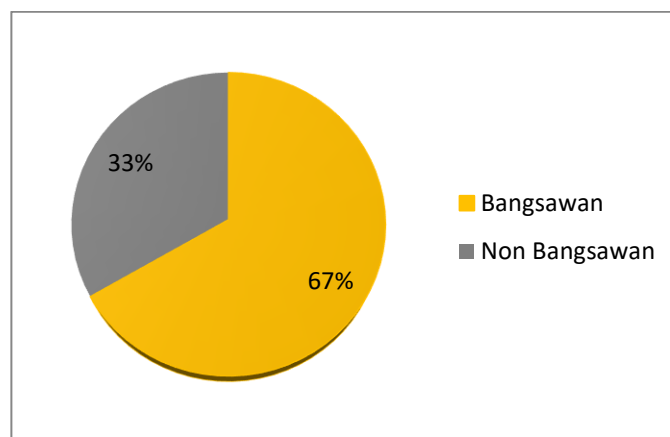
Tabel 5.7
Nama-Nama Yang Menjabat Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Skertaris Daerah Pasca
Pilkada 2018

No	Nama	Jabatan	Status
1	Andi Surya Darma	Sekertaris Daerah	Bangsawan
2	Andi Syamsiar	Kepala Dinas Pendidikan	Bangsawan
3	dr. Hj. A. Khasma Padjalangi. M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Bangsawan
4	Andi Asrijal	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BANGsawan
5	Andi Yusuf	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Bangsawan
6	Andi Ikhwan Burhanuddin	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangsawan
7	A. Syahrulsamsul, s.e, m.s	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Bangsawan
8	Andi Saharuddin	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Bangsawan
9	H A Promal Pawi	Kepala Dinas Sosial	Bangsawan
10	Siti rosnawati	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	Non Bangsawan
11	Andi Irsal Ahmad	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Bangsawan
12	Andi Syahrul	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Bangsawan
13	Andi Darmawan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bangsawan
14	A. Arsyad, SH, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bangsawan
15	Drs. Chaerul Saleh, SE,MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Non Bangsawan
16	Andi Muhammad Ridawan	Kepala Dinas Perhubungan	Bangsawan
17	Drs. Andi Amran, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Bangsawan
18	H Baharuddin	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Bangsawan
19	Drs. Muhammad Akbar, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Non Bangsawan
20	Andi Alimuddin Massappa	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bangsawan
21	ANdi Ansar Anas	Kepala Dinas Kebudayaan	Bangsawan
22	Drs. H. A. Pahrum Pawi , MTP.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bangsawan
23	Ir. Wahidah M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Non Bangsawan
24	Budiono, S.Sos.,M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata	Non Bangsawan
25	Ir. H. Sunardi Nurdin, M. Si	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikulturadan	Non Bangsawan

		Perkebunan	
26	H Andi Aris Handono	Kepala Dinas Peternakan	Bangsawan
27	Chairul saleh	Kepala Dinas Perdagangan	Non Bangsawan
28	Khalid Shihab	Kepala Dinas Perindustrian	Non Bangsawan
29	Asiswa Karim	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Non Bangsawan
30	A Abu Bakar	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bangsawan
31	H Najamuddin	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Non Bangsawan
32	Andi Herman	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Bangsawan
33	Andi Fajaruddin	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bangsawan
34	Andi Nurmalia	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bangsawan
35	Dray Fibrianto	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Non Bangsawan
36	H andi Sumardi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bangsawan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Gambar 5.3
Persentase Jumlah Bangsawan dalam Jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Sekertaris Daerah Pasca Pilkada 2018



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Sejak kepemimpinan Andi Fashar Padjalangi yang dimulai di Tahun 2013 sampai dengan 2018, telah melakukan banyak perubahan ditubuh birokrasi Kabupaten Bone. Sehingga dilihat dari data tersebut terindikasi adanya patronase dalam pembentukan struktur birokrasi karena mutasi pejabat birokrasi selalu

ditentukan setelah kontestasi pilkada berlangsung dan pejabat yang mendapatkan promosi adalah para staf khusus bupati yang tentunya memiliki kedekatan khusus dengan Kepala Daerah dan beberapa juga merupakan tim pemenangan Andi Fashar-Ambo Dalle dalam Pilkada, seperti Andi Promal Pawi yang merupakan Koordinator Tim Pemenangan 'PRO TAFADDAL, kemudian Andi Syamsidar yang merupakan adik Kandung Nurdin Halid juga merupakan paket Koalisi dalam Pilkada serentak tahun 2018.

Formasi birokrasi yang terbentuk jika dilihat di grafik 5.1 dan grafik 5.2 terlihat bahwa kalangan bangsawan selalu mendapat porsi yang lebih besar dibanding dengan kalangan non bangsawan, bahkan persentasenya naik 8% dari tahun 2013 sampai dengan 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsawan punya dominasi dalam struktur birokrasi yang dibentuk oleh Andi Fashar Padjalangi sebagai Bupati Bone 2 Periode (2013-2023). Namun Hubungan tersebut dibantah oleh pejabat terpilih dan Bupati sebagai penentu struktur birokrasi. Pilihan tersebut adalah murni dari hasil assesment yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pejabat yang dimutasi bukan karena adanya hubungan politik yang mengikat.

Semua yang dilantik dan mendapat jabatan baru mengacu pada assesment yang dilakukan, jadi orang yang diberikan jabatan baru dan mendapat posisinya tentu harus sesuai dengan bidangnya” (wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi 4 Oktober 2019, Pukul 8.30 WITA)

Relevan dengan pernyataan Andi Fashar, Kepala Dinas Kebudayaan yang baru pasca pilkada 2018 mengungkapkan bahwa mutasi jabatan yang dilakukan sesuai dengan penilaian kinerja pegawai. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Ansar Anas Sebagai berikut :

Kita telah memperlihatkan kinerja selama ini, dan siap ditempatkan dimana saja, untuk perbaikan arah birokrasi yang lebih baik wajar saja bila ada rotasi dalam struktur birokrasi, apalagi pejabat yang diberikan amanah pasti sudah melalui evaluasi sehingga jabatan baru yang dijalankan harusnya telah sesuai dengan porsinya masing-masing (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan, 4 Oktober 2019, Pukul 11.00 WITA)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang berubah pasca kontestasi pilkada bukan untuk kebutuhan politik namun langkah tersebut dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pejabat yang dilakukan sebelumnya. Namun pernyataan berbeda dilontarkan oleh Sekertaris Umum Partai Golkar saat berbicara tentang pengaruh kekuasaan dalam birokrasi sangat menentukan dominasi bangsawan dalam kontestasi pilkada. Wawancara dengan Firman Batari, Sekertaris Umum Partai Golkar sebagai berikut :

Kenapa bangsawan berkuasa, karena tadi sejarah bangunan kekuasaan bangsawan yang telah terbentuk dari dulu sampai sekarang. Bangsawan punya basis kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga kekuasaan itu masih bertahan, birokrasi yang dibangun juga tentu punya pengaruh dalam mendapatkan dukungan politik.(wawancara dengan Firman Batari, 30 September 2019, Pukul 8.30 WITA)

Faktor kekuasaan tentu saja mempengaruhi munculnya patronase di dalam sebuah birokrasi. Sulit untuk dihindarkan karena yang diangkat menjadi pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu orang-orang yang punya loyalitas kepada pemimpin. Andi Fashar Padjalangi sebagai Bupati dua periode telah memperlihatkan beberapa kali rotasi jabatan dalam birokrasi di Kabupaten Bone.

Tabel 5.8
Daftar Nama Staf Khusus Bupati yang Promosi Jabatan Pasca PILKADA

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan	Status
1	Andi Herman SH,MH	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah	Pasca Pilkada 2013	Bangsawan
2	Drs. Sudirman S.St., M.Si	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas PU dan SDA	Pasca Pilkada 2013	Non Bangsawan

4	Drs. Rosalin Hab. S.Sos, M.Si	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pendidikan	Pasca Pilkada 2013	Non Bangsawan
5	Drs. H. Syarifuddin	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan	Pasca Pilkada 2013	Non Bangsawan
6	Drs. Asiswa Karim	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Perhubungan	Pasca Pilkada 2013	Non Bangsawan
7	Drs. Andi Fajaruddin, MM	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pasca Pilkada 2013	Bangsawan
8	H Baharuddin	Staf Ahli Bupati	Kepala Dinas Koperasi	Pasca Pilkada 2018	Non Bangsawan
9	Hj A Syamsiar	Staf Ahli Bupati	Kepala Dinas Pendidikan	Pasca Pilkada 2018	Bangsawan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa staf khusus bupati mendapat jabatan yang strategis setelah kontestasi pilkada, tentunya hal tersebut menjadi bukti bahwa orang yang punya kedekatan dengan Bupati Bone diberi jabatan penting agar memperkuat kekuasaan Andi Fashar dalam Birokrasi, Sebagai hubungan patron dan klien dalam teori patronase, Andi Fashar sebagai Patron dan Para pejabat yang dipromosi sebagai klien karena merupakan orang-orang terdekat dengan Andi Fashar yang kemudian diberi jabatan strategis dalam birokrasi.

Dari beberapa uraian diatas, patronase birokrasi punya pengaruh besar untuk keberlangsungan kekuasaan Andi Fashar Padjalangi, karena orang-orang yang dipromosikan jabatannya menjadi kepala dinas adalah para staf khusus bupati dan beberapa diantaranya pernah menjadi tim sukses saat pilkada, sehingga tentu saja ada kedekatan yang terjalin diantara para pejabat eselon II tersebut dengan Bupati. Sehingga dukungan politik pasti akan mengalir ke Petahana yang

berasal dari kekuatan patronase birokrasi meskipun dukungan tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan karena harus menjaga netralitas birokrasi.

5.2.3 Patronase Partai Politik

Partai politik merupakan dasar kekuatan jika ingin mendapatkan Jabatan politik, untuk maju dalam kontestasi pilkada juga harus memiliki basis yang kuat dalam partai politik sebagai kendaraan untuk menjadi calon kandidat dalam Pilkada maupun Pemilu. Basis suara partai politik di Kabupaten Bone masih dikuasai oleh partai golkar, Sejak 2008 sampai sekarang Partai golkar masih menjadi peraih kursi legislatif terbesar di DPRD Kabupaten Bone. Relevan dengan hasil tersebut, Konstestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone juga selalu dimenangkan oleh calon yang diusung oleh partai Golkar.

Patronase dalam partai politik tidak bisa dihindarkan, Partai Golkar sebagai partai yang mendominasi di Kabupaten Bone merupakan tempat berlabuhnya para keturunan bangsawan, bahkan hampir seluruh partai di Kabupaten Bone posisi pentingnya diisi oleh keturunan bangsawan. Sehingga timbul persepsi bahwa keturunan bangsawan punya peluang lebih besar untuk menjadi kader yang partai karena gelar bangsawannya yang dianggap dapat mendokrak suara partai politik. Namun Partai Golkar membantah anggapan tersebut, karena selama ini di era demokrasi tak ada lagi batasan strata sosial untuk berproses dalam partai politik. Berikut Wawancara dengan Sekertaris Umum Golkar Bone :

Sekarang sudah era demokrasi, golkar selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi kader, jika ada dari non bangsawan kami akan terima, jika faktanya golkar masih didominasi oleh bangsawan itu karena keturunan bangsawan memang punya keterkaitan dengan kekuasaan sehingga lebih mudah dalam

berpolitik. (wawancara dengan Firman Batari, 30 September 2019, Pukul 8.30 WITA)

Namun pernyataan berbeda dinyatakan oleh Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, wawancara dengan Petinggi Partai Demokrat tersebut sebagai berikut :

Kaderisasi dalam partai tetap harus terbuka bagi siapa saja, namun dalam proses politik keturunan bangsawan pasti diprioritaskan lebih, karena dalam kontestasi politik gelar keturunan bangsawan masih diperhitungkan oleh masyarakat, jadi tidak heran jika di Partai Demokrat kader bangsawan yang paling terlihat eksistensinya (wawancara dengan Andi Suaedi, 5 Oktober 2019, 19.30 WITA)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, partai politik dalam rekrutmen kadernya terbuka untuk semua golongan yang ingin berproses di dalam partai politik. Namun dalam praktek politik bangsawan tetap punya nilai tawar yang tinggi, selain modal yang kuat bangsawan juga dipercaya dapat menaikkan suara partai politik. Bangsawan dalam partai politik menjadi seorang patron dengan pengikutnya yang loyal. Meskipun pihak partai golkar menampilkan anggapan bahwa bangsawan punya peluang lebih besar di banding kader dari non bangsawan, namun fakta membuktikan bahwa keturunan bangsawan masih sangat mendominasi di partai golkar. Tercatat dalam pemilu terbaru tahun 2019, keluarga Andi Fashar sebagai Ketua DPC Golkar Kabupaten Bone, mulai dari tingkat DPRD sampai DPR pusat pasti ada kandidat yang meraih kursi legislatif.

Tabel 5.9
Nama Keluarga Andi Fashar Padjalangi dalam Partai Golkar

No	Nama	Partai	Jabatan
1	Andi Rio Padjalangi	Golkar	DPR RI 2019-2014
2	Andi Izman Padjalangi	Golkar	DPRD Prov Sulsel 2019-2014
3	Andi Ryad Padjalangi	Golkar	DPRD Kabupaten Bone 2019-2024

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Tabel diatas menunjukkan betapa kuatnya posisi bangsawan dalam partai politik, Partai Golkar sebagai partai paling kuat di Kabupaten Bone seakan telah berada di genggamannya para keturunan bangsawan, pembagian posisi strategis dalam merengkuh kursi partai dalam parlemen menjadi bukti kekuatan keturunan bangsawan yang masih eksis sampai saat ini.

Partai Politik sebagai kendaraan politik dalam pencalonan peserta pilkada menjadi keunggulan bangsawan yang telah punya basis massa pada partai politik. Selama kontestasi pilkada di Kabupaten Bone berlangsung selalu dari kalangan bangsawan yang dicalonkan, seakan menjadi syarat khusus untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah, munculnya berbagai reaksi atas fakta tersebut kemudian di jelaskan oleh pengurus Partai Golkar bahwa tidak ada syarat khusus harus bangsawan yang dicalonkan dalam Pilkada. Wawancara dengan Sekertaris Partai Golkar Bone, sebagai berikut :

Tidak ada lagi domain yang mempengaruhi partai golkar bahwa yang harus dicalonkan adalah keturunan bangsawan. Tetapi yang mendominasi adalah siapa yang bisa diterima oleh masyarakat, maka itu selama ini masih bangsawan yang dicalonkan, dan faktanya karena pada bangunan kultur kita adalah patrenalism yang bisa diterima masyarakat sampai hari ini dalam konsepsi politik adalah orang yang memiliki pengaruh dan memiliki kekuasaan, sementara kekuasaan itu tadi dia telah bermodalkan bangunan dari awal , sekiranya ada non bangsawan orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sama dengan sekarang mesti itu yang dicalonkan. (wawancara dengan Firman Batari, 30 Sempember 2017, Pukul 8.30 WITA)

Penyataan senada diungkapkan oleh Andi Fashar Padjalangi sebagai kandidat terpilih yang dicalonkan oleh partai golkar. Hasil wawancara sebagai berikut :

Partai itu kan sebagai kendaraan politik untuk maju kotestasi, dan tak ada batasan khusus harus bangsawan jika ingin berproses di partai politik. Pencalonan kiranya semua bisa asal ada kemauan dan memenuhi syarat, kenyataan bahwa bangsawan

yang dominan ya karena kita sudah menjadi kader golkar sejak dulu, dan golkar tentu saja lebih memilih kader yang berkualitas. (wawancara, Andi Fashar Padjalangi, 4 Oktober 2019 Pukul 8.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa partai golkar tetap mengedepankan kesetaraan untuk semua kalangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa bangsawan selalu menjadi prioritas partai politik. Fakta tersebut ditunjukkan dengan adanya peran penting bangsawan yang dibangun sejak dahulu, kader partai politik kebanyakan dari keturunan bangsawan, hal tersebut dikuatkan dengan terpilihnya ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone sejak tahun 1971 sampai dengan 2019, semua berasal dari kalangan bangsawan Bone.

Tabel 5.10
Data Ketua Golkar Bone tahun 1971-2019

No	Nama	Periode	Status
1	H. Andi Sebbu	1971-1978	Bangsawan
2	Andi Dadi	1978-1983	Bangsawan
3	H. Andi Pattikkeng	1983-1988	Bangsawan
4	H. Andi Bachtiar	1998-1993	Bangsawan
5	H. Andi Haruni	1993-1998	Bangsawan
6	H. Andi Muh. Idris Galigo	1998-2013	Bangsawan
7	H. Andi Fashar Padjalangi	2013-2024	Bangsawan

Sumber : Sekertariat Partai Golkar Bone

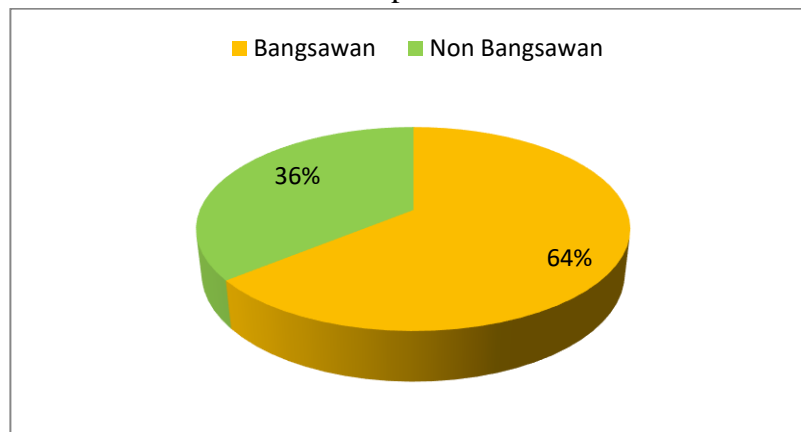
Tabel diatas menunjukkan bahwa betapa mendominasinya bangsawan dalam Partai Golkar, namun bukan hanya di Partai Golkar, 7 Partai Lainnya juga memiliki ketua Partai dari Kalangan Bangsawan, dan hanya 5 Partai yang diketuai oleh kalangan non bangsawan. Data tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 5.11
Data Ketua Partai di Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

No	Nama	Partai	Status
1	Andi Fashar Padjalangi	Golkar	Bangsawan
2	Andi Agus Salim Gadjong	Gerindra	Bangsawan
3	Andi Wahyudi Taqwa	PAN	Bangsawan
4	Andi Rustan Sello	Demokrat	Bangsawan
5	Andi Zainal	Perindo	Bangsawan
6	Andi Baso Susanto	Hanura	Bangsawan
7	Andi Patabai Pabokori	Berkarya	Bangsawan
8	Andi Mappamadeng	PDIP	Bangsawan
9	Ali Imran	PKS	Non Bangsawan
10	Muhammad Amin	PPP	Non Bangsawan
11	Muhammad Rusdi	PKB	Non Bangsawan
12	Syaifullah Latif	PBB	Non Bangsawan
13	Sultani	Nasdem	Non Bangsawan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Grafik 5.4
Presentase Jumlah Bangsawan Yang Menjadi Ketua Partai Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Partai Golkar sebagai partai politik penguasa di Kabupaten Bone yang diikuti oleh partai lainnya menjadi kekuatan Andi Fashar dalam pencalonannya dalam kontestasi Pilkada di Tahun 2018, semua partai politik di Kabupaten Bone berkoalisi dengan partai golkar untuk mendukung pencalonan Andi Fashar

Padjalangi sebagai calon bupati dalam kontestasi Pilkada Tahun 2018. Penantang saat itu lahir dari calon independen yang kemudian didiskualifikasi karena verifikasi data yang tidak memenuhi syarat. Bakal calon tersebut yaitu dr. Umar, namanya seakan eksis saat menjelang pilkada sebagai penantang yang paling serius. Wawancara dengan dr. Umar sebagai bakal calon terkuat dari jalur independen sebagai berikut :

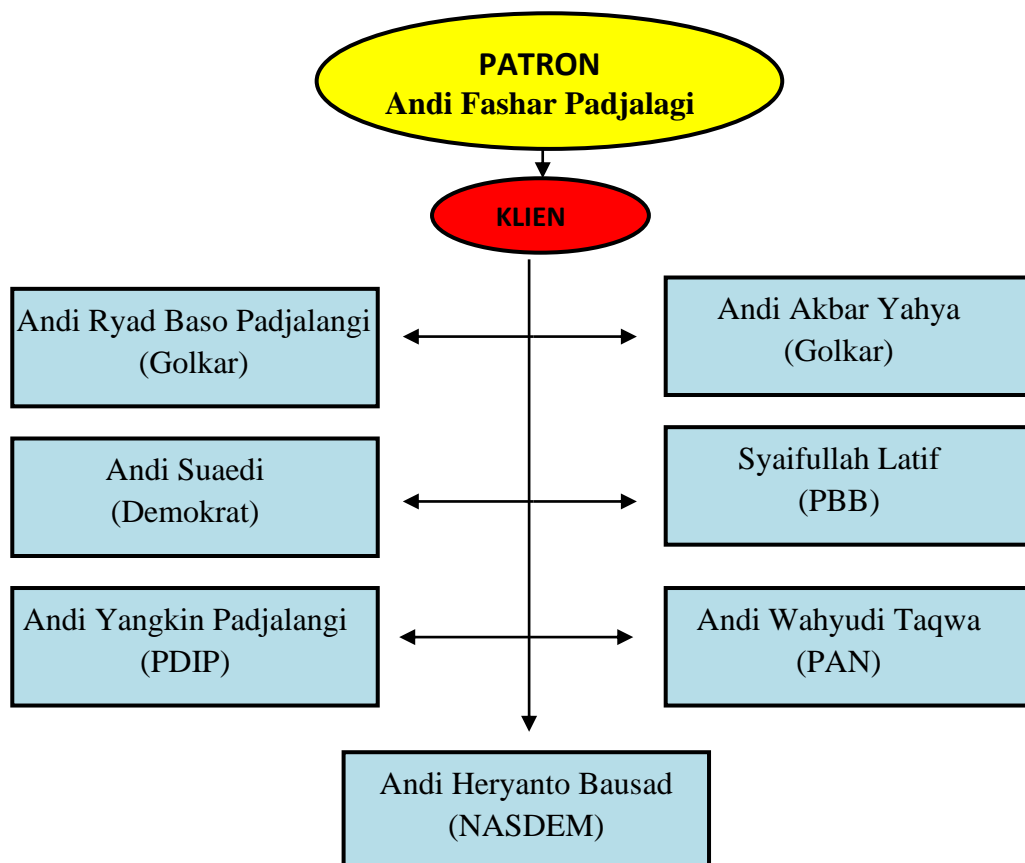
Saya mencalonkan itu setelah semua partai politik berkoalisi untuk mendukung petahana, jadi jalur dukungan parpol tidak bisa. Sehingga kami menempuh jalur independen, namun kenyataannya kami tidak lolos karena berbagai hambatan. Sebelum maju memang sudah agak pesimis karena lawan kami adalah petahana yang tentunya sebagai pemegang kekuasaan. (wawancara dengan dr. Umar. 30 September 2019, Pukul 10.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas calon dari non bangsawan telah berupaya untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada, namun verifikasi data yang tidak lengkap membuat dr. Umar tidak bisa lanjut dalam pemilihan. Pasangan dari non bangsawan tersebut bahkan menggugat sampai kepengadilan sebagai ketidakpercayaan terhadap proses pencalonan dirinya yang tidak diterima. Partai politik sebagai kendaraan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah juga sudah memberikan dukungannya terhadap petahana sehingga peluang dari non bangsawan semakin tertutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Partai Demokrat Bone, Andi Suaedi sebagai berikut :

Kita dari demokrat sejak awal memang telah memberikan dukungan penuh terhadap Pak Bupati, sebenarnya saya juga punya peluang besar untuk mencalonkan namun karena permintaan khusus pak bupati yah kita alihkan dukungan kepada petahana, dan semua partai politik di bone ini memang masih percaya terhadap kepemimpinan pak andi Fashar, jadi saya kira dukungan oleh seluruh parpol itu adalah hal yang wajar, apalagi kami juga punya kedekatan dengan beliau. (wawancara dengan Andi Suaedi, 9 Oktober 2019 Pukul 19.30 WITA)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa patronase politik bukan hanya ada di dalam Partai Golkar, Andi Suaedi sebagai kader Partai Demokrat mengakui bahwa ada kedekatan khusus yang menjadikan dirinya memilih untuk mendukung Andi Fashar dari pada maju sebagai Calon Bupati. Ketua Partai Golkar seakan menjadi patron yang kuat dengan para pengikutnya yang loyal bahkan dari partai lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa patronase partai politik merupakan indikator yang kuat dalam kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone karena adanya patron yang kuat dari kalangan bangsawan dalam tubuh partai politik dengan para pengikutnya yang loyal.

Gambar 5.1



Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Media dan Wawancara, 2019

Gambar hubungan patronase diatas menunjukkan bahwa Andi Fashar sebagai Patron mempunyai dukungan kuat yang berasal dari berbagai elit partai politik, sehingga tak heran jika dirinya di usung oleh 11 Partai Politik saat Pilkada 2018. Dalam jaringan patronase, beberapa ketua DPC Partai politik di Kabupaten Bone menjadikan Andi Fashar sebagai patron dalam kontestasi politik. Seperti Syaifullah Latif Ketua DPC Partai Bulan Bintang telah menjadi klien dengan memberikan dukungan politik penuh kepada Andi Fashar sejak tahun 2008 meskipun pada saat itu kalah dari Andi Idris Galigo, Kemudian Andi Wahyudi Taqwa Ketua DPC PAN Kabupaten Bone, dirinya memberikan dukungan penuh kepada Andi Fashar sebelum kontestasi pilkada 2018 dimulai padahal saat itu kader PAN yaitu Irwandi Natsir telah menyatakan akan menantang Andi Fashar meskipun pada akhirnya Partai PAN mendukung Andi Fashar Padjalangi sebagai calon Bupati Bone 2018.

Selanjutnya dari Partai Nasdem Andi Heriyanto Bausad, calon legislatif pemilik suara terbanyak di Dapil II Kabupaten Bone pada Pemilihan Legislatif 2019. Hubungan patronase politik terlihat pada dukungan penuh Andi Heriyanto kepada Andi Fashar pada Pilkada 2018, dukungan tersebut langsung di deklarasikan bersama Sahabat AHB yaitu massa politik yang dimiliki oleh Andi Heryanto. Patronase Politik yang terjadi dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone sesuai dengan pemikiran Scoot (1972) yaitu hubungan patronase terjadi karena adanya ikatan politik antara dua instrumen dimana seseorang yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang tinggi seperti Andi Fashar akan

menjadi Patron dengan diikuti oleh Klien yang memiliki kedudukan lebih rendah namun bisa memberikan dukungan yang saling menguntungkan.

Partai politik di Kabupaten Bone memang tak bisa dipisahkan dengan peran bangsawan, dalam komposisi Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Bone setiap partai politik pasti punya kandidat dari bangsawan yang memiliki kursi, tercatat ada 19 kandidat dari kalangan bangsawan yang berhasil meraih kursi dari pemilihan legislatif dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone.

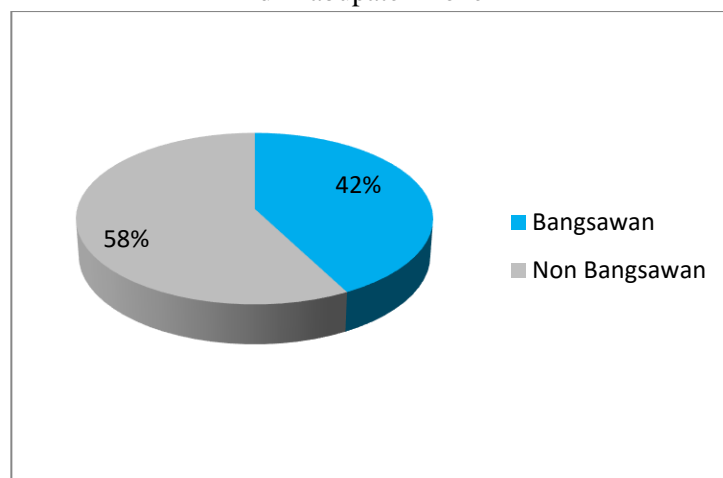
Tabel 5.12
Daftar Bangsawan yang Meraih Kursi Legislatif 2019-2024 di Kabupaten Bone

No	Nama	Partai	Perolehan Suara	Keterangan
1	Andi Ryad Baso Padjalangi	Golkar	3.618	Dapil 1
2	Andi Irwan Wirasasti	PKS	3.275	Dapil 1
3	Andi Muhammad Wahyu	Demokrat	3.035	Dapil 1
4	Andi Wahyudi Taqwa	PAN	2.855	Dapil 1
5	Andi Muh. Salam	Nasdem	1.694	Dapil 1
6	Andi Muh. Bahtiar	Hanura	2.190	Dapil 1
7	Andi Boby Ishak	Golkar	3.353	Dapil 2
8	Andi Heryanto Bausad	Nasdem	4.047	Dapil 2
9	Andi Nur Salam	PAN	2.370	Dapil 2
10	Andi Atoro	Golkar	4.843	Dapil 3
11	H. Andi Suaedi	Demokrat	4.013	Dapil 3
12	Andi Taufik Kadir	Nasdem	3.007	Dapil 3
13	Andi Adil Fadli Lura	PKB	1.812	Dapil 3
14	Andi Muhammad Nur Pakki	PBB	3.074	Dapil 3
15	Andi Purnama Sari	Gerindra	3.790	Dapil 4
16	Andi Mappanyukki Takka	Golkar	3.285	Dapil 4
17	Andi Akbar Yahya	Golkar	3.851	Dapil 5
				Dapil 5
18	Andi Akhiruddin	PDIP	3.881	Dapil 5
19	Andi Muhammad Idris Rahman	Golkar	3.662	Dapil 5

Sumber : Data diolah peneliti dari KPUD Kab. Bone

Data dari table diatas menunjukkan bahwa ada 19 Orang dari kalangan bangsawan yang berhasil merebut kursi di DPRD Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone tersedia 45 Kursi DPRD sehingga jika dihitung persentasenya maka bangsawan berhasil mendapat 42,22% tempat pada legislative di Kabupaten Bone.

Grafik 5.5
Persentase Jumlah Bangsawan yang Meraih Kursi Legislatif 2019-2024
di Kabupaten Bone



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa Bangsawan mempunyai 42% tempat dalam kursi legislatif DPRD Kabupaten Bone, jumlah tersebut memang masih kalah dari kalangan non bangsawan yaitu 52%, namun dukungan kalangan non bangsawan kepada Andi Fashar Padjalangi juga kuat, seperti pada gambar 5.1 hubungan patronase dengan Ketua DPC Partai PBB Bone yang notabene bukan dari kalangan bangsawan namun tetap menjadi klien politik dari Andi Fashar Padjalangi.

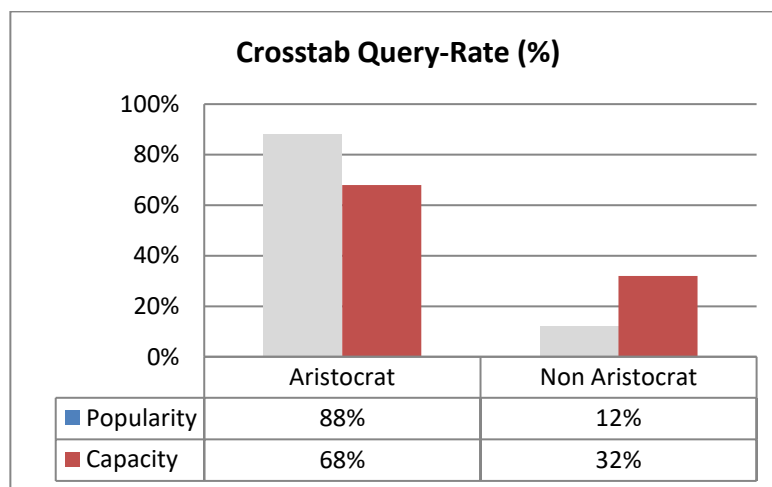
Dari beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa Andi Fashar Padjalangi sebagai elit politik dari kalangan bangsawan memiliki jaringan patronase dalam partai politik yang kuat, bukan hanya dalam partai Golkar namun dari partai lain

pun Andi Fashar mempunyai dukungan yang jelas. Eksistensi bangsawan dalam partai politik tak bisa dipungkiri memang sangat kuat, terlihat dalam tabel 5.10 menunjukkan 64% dari kalangan bangsawan menjabat sebagai Ketua Partai Politik di Kabupaten Bone.

5.2.4 Sistem Politik

Almond dan Powel mengungkapkan bahwa sistem politik akan di pengaruhi sistem-sistem ekonomi domestik, sumber-sumber alam dan lingkungan alamiah mereka, sistem pendidikan dan teknologi, dan sistem-sistem etnik dan kebudayaan mereka. Semua sistem tersebut akan berbuah menjadi struktur kesempatan dalam politik. Penguasaan ekonomi maupun politik serta kultural akan memunculkan kekuatan berupa popularitas dan kapasitas. Struktur kesempatan dalam sistem politik di Indonesia Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam sistem politik di Indonesia membutuhkan biaya demokrasi yang begitu besar kemudian sruktur kesempatan dalam sistem politik sangat dipengaruhi oleh Popularitas dan kapasitas serta Elitisme pelaku politik.

Grafik 5.6 Struktur Kesempatan dalam Sistem Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Kabupaten Bone merupakan daerah yang struktur kesempatan politiknya seolah menempatkan keturunan bangsawan sebagai golongan yang paling diprioritaskan dalam pemilihan kepala daerah pada grafik diatas menunjukkan bahwa bangsawan memiliki Popularitas 88% dan Kapasitas 68% sehingga wajar jika bangsawan yang selalu menjadi pemenang dalam Kontestasi Politik, hal tersebut kemudian tercermin dari calon bupati yang ikut kontestasi 100% berasal dari keturunan bangsawan yang bergelar “ANDI”. Namun, Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Bone sebagai penyelenggara PILKADA menegaskan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Bone tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada perlakuan istimewa terhadap bangsawan dalam proses pencalonan sampai penetapan pemenang, tetapi memang faktanya pendaftar dominan dari kalangan bangsawan. Wawancara dengan Komisioner KPUD Bone sebagai berikut :

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di kabupaten bone itu sama halnya dengan yang dilaksanakan di tempat lain, dan tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada keturunan bangsawan dalam kesempatan ikut serta dalam pilkada. Namun hanya secara kebetulan selama ini bangsawan yang mencalonkan dan memenuhi syarat. Kemudian kita tidak bisa menafikkan bahwa yang terpilih adalah memang orang yang memiliki jaringan yang kuat dan pendukung yang punya loyalitas. Kemudian memang lebih banyak yang mendaftar dari kalangan bangsawan. Ada yg berkembang dimasyarakat bahwa di bone ini adalah dulunya kerajaan dan masih banyak penduduk bone masih berkeinginan yang menjadi pemimpinnya dari kalangan bangsawan. (wawancara dengan Andi Mappaningsong, 4 Oktober 2019, Pukul 11.00 WITA)

Hal senada di sampaikan oleh Andi Fashar Padjalangi sebagai Bupati dua

Periode dari kalangan bangsawan, hasil wawancara sebagai berikut :

Gelar Andi bukanlah syarat untuk mencalonkan sebagai bupati, semua tetap sesuai peraturan daerah tentang pencalonan bupati, namun memang kenyataannya selama ini kebanyakan yang mendaftar adalah dari keturunan ningrat atau Andi, dan tidak dipungkiri bahwa Bone ini daerah adat, yang dari dulu pemimpin daerah ini dari keturunan bangsawan, dan kebetulan juga

masyarakat masih pilih yang darah bangsawan. (wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi, 4 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wita)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis telah dijalankan sebagaimana mestinya, namun dalam struktur kesempatan yang ada dalam proses politik, bangsawan memang lebih mendominasi dalam pendaftaran calon. Kemudian partai politik sebagai kendaraan menuju pencalonan juga didominasi oleh bangsawan sebagai pemegang peran penting dalam partai politik.

Struktur kesempatan dalam politik di Kabupaten Bone juga ditentukan oleh Popularitas dan Kapasitas jika ingin memperoleh sebuah kekuasaan. Andi Fashar Padjalangi sebagai Bupati Tepilih dua Periode punya popularitas yang tinggi di Kabupaten Bone, kiprahnya mulai terlihat disaat menjadi camat di Kecamatan Cina dan Tanete Riattang, dan sebagai wakil bupati Bone tahun 2004-2008 yang berpasangan dengan Andi Idrsi Galigo. Popularitas terlahir dengan sendirinya sesuai dengan kiprahnya dalam jabatan yang diembannya. Kapasitasnya juga telah teruji dalam setiap tugasnya dalam pemerintahan yang selalu mendapat apresiasi dari masyarakat. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Andi Baso Batara (Budayawan, Pemilik Museum Lapawawoi) sebagai berikut :

Soal popularitas dan kapasitas tak perlu lagi diragukan dari sosok Andi Fashar, beliau sudah mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Bone sejak dulu, apalagi dengan keturunan bangsawan dari keluarga padjalangi, keluarga padjalangi bukan lagi hal asing di daerah ini. saudara bahkan anaknya telah dipilih secara demokratis oleh masyarakat. (wawancara dengan Andi Baso Batara, 4 September, Pukul 11.00 Wita)

Pihak Partai Golkar memberikan pernyataan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tentang pentingnya popularitas dan kapasitas

dalam kesempatan politik. Wawancara dengan Sekertaris umum DPD II Partai

Golkar sebagai berikut :

Andi Fashar mempunyai kunci kemenangan karena dia sudah punya pegangan kekuasaan yang terbangun sejak lama dan melekat pada masyarakat. Orang bone itu orang baik, siapa yang pernah melahirkan kesan pada dirinya yang baik maka dia akan sangat diperhitungkan. Masyarakat disini adalah masyarakat paternalism yang memiliki falsafah, *folo fafa dolo fanni*, bahwa siapa yang memegang kekuasaan itulah perwujudan sikap dan pengaruh sebuah kekuasaan, kalau *fafa* (penguasa) yang bilang selesai, persoalan masyarakat pasti ikut. Kami dari golkar memanfaatkan itu. makanya kami mengambil figur pasti dari pemegang kekuasaan. Dan kami selama ini berafiliasi dengan kekuasaan. Makanya golkar memiliki kekuatan yang menyeluruh karena dimana ada kekuasaan disitulah golkar berada.. Sejak 1960 golkar selalu memegang kekuasaan formal sampai hari ini, karena seluruh sendi-sendi kemasyarakatan, juga memiliki sub-sub kekuasaan yang pasti ketergantungan dengan pemerintah. (wawancara dengan Firman Batari, 30 September 2019, 8.30 WITA)

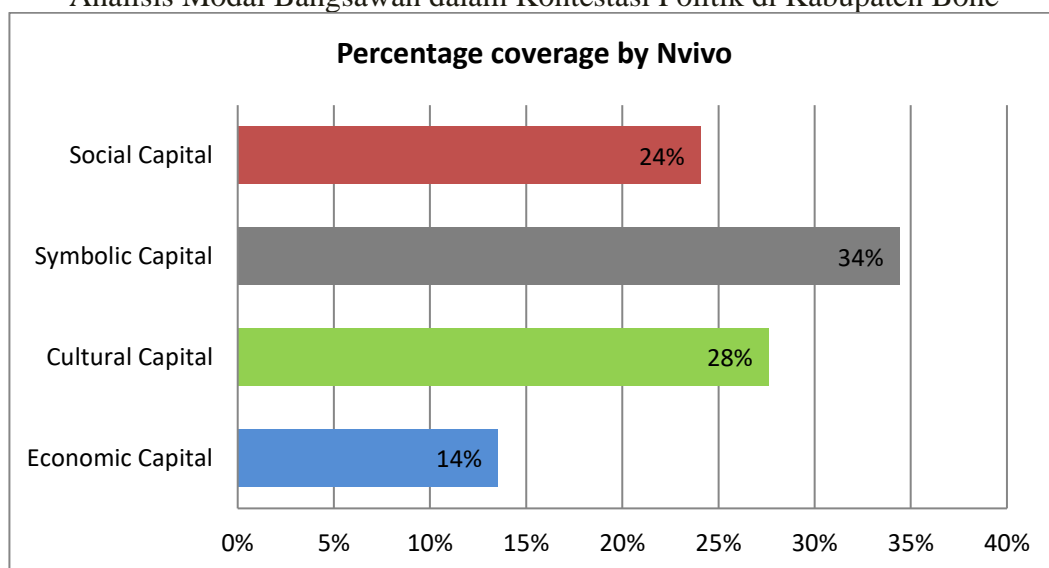
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kesempatan politik sangat dipengaruhi oleh popularitas dan kapasitas yang lahir dari kekuasaan itu sendiri. Masyarakat bone yang masih cenderung menginginkan pemimpin dari figur yang memiliki popularitas dan kapasitas didalam sebuah kekuasaan, membuat partai golkar memanfaatkan hal itu dengan selalu memberikan dukungan penuh kepada calon bupati dari penguasa yang sejatinya berdarah bangsawan.

Arena	
	Patronase birokrasi punya pengaruh besar untuk keberlangsungan kekuasaan kepemimpinan Andi Fashar Padjalangi, karena orang-orang yang dipromosikan jabatannya menjadi kepala dinas adalah para staf khusus bupati, sehingga tentu saja ada kedekatan yang terjalin diantara para pejabat eselon II tersebut dengan Bupati. Sehingga dukungan politik pasti akan mengalir ke Petahana.
	Patronase partai politik merupakan faktor yang kuat dalam kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone karena adanya patron yang berasal dari kalangan bangsawan di dalam tubuh partai politik dengan para pengikutnya yang punya loyalitas.
	Arena Pilkada masih dikuasai oleh bangsawan, baik dari segi jaringan partai politik sebagai kendaraan menuju kontestasi maupun pilihan masyarakat yang menjadi legitimasi kepercayaan terhadap kekuasaan.
	Sistem politik menghasilkan kesempatan politik yang dipengaruhi oleh popularitas dan kapasitas yang lahir dari kekuasaan itu sendiri. Masyarakat bone yang masih cenderung menginginkan pemimpin dari figur yang memiliki popularitas dan kapasitas didalam sebuah kekuasaan, membuat partai golkar memanfaatkan hal itu dengan selalu memberikan dukungan penuh kepada calon bupati dari penguasa yang sejatinya berdarah bangsawan.

5.3 Capital (Modal) Bangsawan dalam Kontestasi PILKADA

Modal merupakan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor politik yang kemudian dimanfaatkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dalam sebuah arena (*field*). Kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone dalam pembahasan ini dianalisis dengan modal yang dimiliki saat ikut dalam kontestasi politik. Ada 4 (empat) modal yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu modal sosial, modal simbolik, modal kultural, dan modal ekonomi.

Grafik 5.7
Analisis Modal Bangsawan dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus

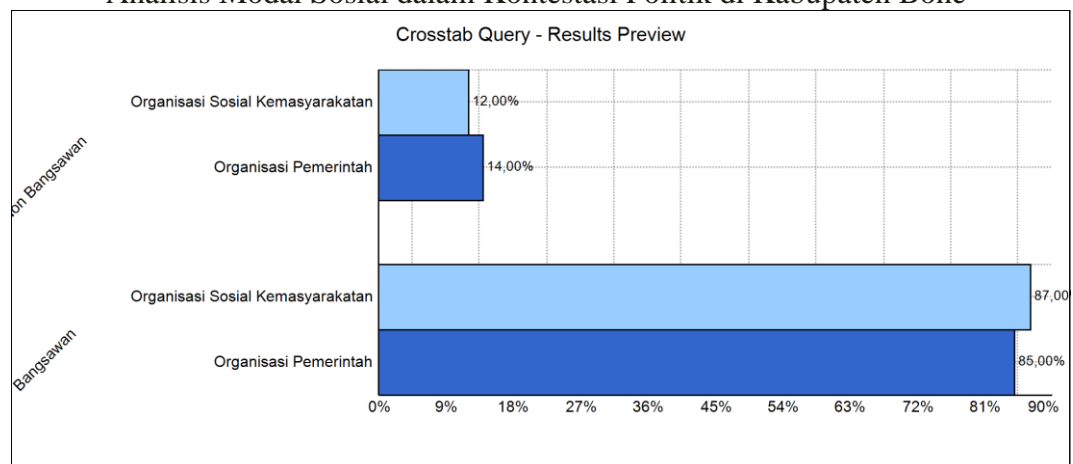
Dari hasil analisis melalui coding Nvivo pada teks wawancara beberapa informan penelitian, terlihat bahwa modal simbolik merupakan modal yang paling besar dominasinya dalam kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bone dengan Persentase dominasi sebesar 34%. Modal simbolik bangsawan tersebut adalah Gelar Andi atau Gelar Kebangsawanan yang kemudian dikapitalisasi

menjadi alat politik untuk meraup suara dalam kontestasi politik. Modal simbolik mempunyai nilai tawar yang tinggi karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Bone masih mempercayai bahwa para keturunan bangsawan mempunyai jiwa kepemimpinan yang sama dengan para raja-raja Bone terdahulu. Kemudian Modal Simbolik diikuti oleh modal-modal lainnya yang dijelaskan lebih mendalam pada tulisan dibawah.

5.3.1 Modal Sosial

Modal sosial merupakan hasil dari bangunan relasi-relasi aktor politik dengan masyarakat yang dapat dilihat dari kegiatan aktor politik seperti berinteraksi dengan masyarakat, membangun relasi dengan organisasi kemasyarakatan, serta membangun relasi dengan pejabat dan pengusaha. Hasil dari bangunan modal tersebut berupa legitimasi masyarakat terhadap aktor politik yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Grafik 5.8
Analisis Modal Sosial dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa bangsawan memiliki modal social yang sangat dominan dibandingkan dengan calon yang bukan dari kalangan

bangsawan, relasi dengan Organisasi Sosial kemasyarakatan dari kalangan bangsawan mendapatkan nilai 87% dominasinya, kemudian relasi bangsawan dengan pemerintah mendapat nilai 85%. Modal sosial yang dibangun oleh Andi Fashar Padjalangi sebagai bangsawan dan pemegang kekuasaan di Kabupaten Bone dimulai sejak beliau bergabung bersama AMPI Kabupaten Bone Tahun 1993-1998 dengan jabatan sekretaris umum, dan sampai saat ini sosok Andi Fashar pernah aktif di 14 organisasi sosial masyarakat di Kabupaten Bone. Relasi yang dibangun melalui organisasi masyarakat merupakan modal yang dianggap memiliki pengaruh untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Wawancara dengan Sekretaris Umum DPD II Partai Golkar bone sebagai berikut :

Figur pilihan kami tentu punya banyak pengalaman dalam organisasi masyarakat, Andi Fashar merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat umum, beliau sudah aktif dalam organisasi daerah Kabupaten bone sejak tahun 90 an, aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan tentu saja menjadikan sosoknya dikenal secara cepat oleh masyarakat. Dan organisasi yang beliau bina adalah organisasi yang punya nama besar. Tentu keaktifannya dalam organisasi menjadikan beliau mudah mendapat dukungan secara politik. (wawancara dengan Firman Batari, 30 September 2019. Pukul 8.30 WITA)

Hasil wawancara diatas relevan dengan rekam jejak Andi Fashar dalam Organisasi masyarakat di Kabupaten Bone. Adapun data organisasi yang pernah di geluti oleh Andi Fashar sebagai berikut :

Tabel 5.13
Jabatan Organisasi Sosial Andi Fashar Padjalangi

No	Jabatan	Periode
1	Sekretaris AMPI Kabupaten Bone	1993-1998
2	Ketua Umum KNPI Kab. Bone	1999-2005),
3	Ketua Kwardcab Pramuka Kab. Bone	2001–2008

4	Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kab. Bone	1999–2009
5	Ketua Harian KONI Kab. Bone	2001–2008
6	Sekretaris DHD 45 Kabupaten Bone	2001–2006
7	Ketua Umum Dewan Kesenian Bone	1999–2007
8	Ketua Umum Persetasi (PSTI) Kabupaten Bone	2001–2008
9	Ketua Kosgoro 1957 Kabupaten Bone	2003–sekarang
10	Ketua Umum IPSI Kab. Bone	2000–2008
11	Ketua Umum PJSI Kab. Bone	2003–2008
12	Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Bone	2005–2008
13	Wakil Ketua Kosgoro 1957 Sulsel	Sekarang
14	Ketua Orari Bone	2015–2018

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa relasi yang dibangun untuk modal sosial dengan aktif dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi figur Andi Fashar sebagai Keturunan Bangsawan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Bukan hanya dalam organisasi masyarakat namun di dalam birokrasi pemerintah Andi Fashar Padjalangi juga mempunyai rekam jejak yang luar biasa, memulai karir di pemerintahan mulai pada tahun 1991 sebagai matri pamong praja di Kecamatan Tanete Riattang sampai menjadi Bupati Bone di Tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi di Makassar Andi Fashar langsung kembali ke Kabupaten Bone untuk mengabdikan ilmunya di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Rekam Jejak Andi Fashar di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dianggap mampu menciptakan budaya kerja sama yang baik yang akhirnya melahirkan

kepercayaan publik. Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Ansar

Anas sebagai berikut :

Andi Fashar merupakan sosok yang sudah dikenal sejak dulu di dalam pemerintahan, beliau sudah aktif dalam pemerintahan sebelum reformasi, sosok yang cerdas dan humbel menjadikan dirinya mudah diterima dalam posisi manapun dalam pemerintahan. Saat menjadi wakil bupati di tahun 2004 Andi Fashar sudah kelihatan jiwa kepemimpinannya yang kuat, namun memang pada PILKADA tahun 2008 kalah dari Petahan yang sesama dari keturunan Bangsawan yaitu Andi Idris Galigo. (wawancara dengan Andi Ansar, 30 September 2019, pukul 11.35 WITA).

Hasil wawancara diatas menunjukkan relasi yang dibangun dengan para pejabat birokrasi telah terealisasi dengan sendirinya karena Andi Fashar sudah sejak lama bergabung dengan birokrasi pemerintah. Rekam jejak Andi Fashar padjalangi dalam pemerintahan dimulai dari tahun 1991 sampai dengan menjadi Bupati di tahun 2013 sampai sekarang.

Tabel 5.14

Jabatan dalam pemerintahan Andi Fashar Padjalangi di Kabupaten Bone

No	Jabatan	Periode
1	Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone	1991–1992
2	Sekwilcam Tanete Riattang Kabupaten Bone	1992–1994
3	Camat Cina Kabupaten Bone	1992–1994
4	Camat Tanete Riattang Kabupaten Bone	1994–1999
5	Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bone	1999–2001
6	Kabag Sosial	2001
7	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bone	2001–2003
8	Wakil Bupati Bone	2003–2008
9	Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Hukum dan Politik	2009
10	Bupati Bone Tahun	2013-2023

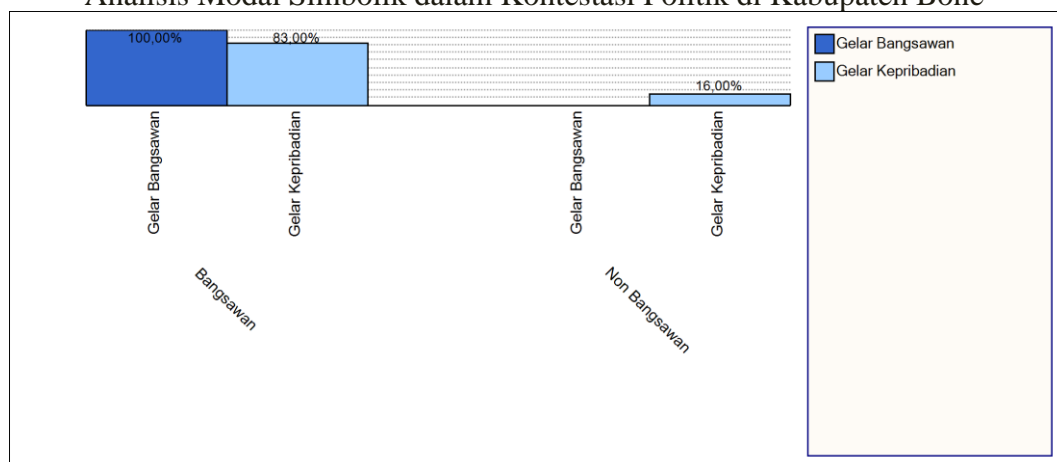
Sumber : diolah oleh peneliti 2019

Dari uraian diatas, modal sosial yang dibangun oleh Andi Fashar Padjalangi secara terstruktur telah dilakukan sejak dulu, mulai dari Relasi dengan Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, dengan organisasi masyarakat, sampai dengan Pejabat dalam birokrasi. Modal sosial ini menjadikan Andi Fashar sangat diperhitungkan dalam kontestasi politik, terbukti dengan terpilihnya menjadi Bupati dua Periode di Kabupaten Bone.

5.3.2 Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan modal yang berasal dari kehormatan yang didapatkan dari garis keturunan misalnya turunan para raja, para darah biru atau bangsawan, *Capital* simbolik ini menjadikan bangsawan mendapat tempat khusus oleh masyarakat umum karena memiliki sesuatu yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Namun meski kapital ini dapat diwariskan tetap butuh adanya legitimasi dari masyarakat untuk menghasilkan kekuasaan simbolik. Kapital yang dapat diwariskan ini merupakan kuasa genetis yang secara otomatis diperoleh dari para pendahulunya.

Grafik 5.9
Analisis Modal Simbolik dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa modal simbolik bangsawan memang menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsawan, Modal simbolik yang didapatkan dari gelar keturunan bangsawan mendapat nilai 100% karena jelas kalangan non Bangsawan tidak memilikinya, sedangkan modal simbolik yang didapatkan dari gelar kepribadian, bangsawan mempunyai dominasi yang besar pula yaitu sebesar 83%.

Kabupaten Bone merupakan daerah dengan adat yang sangat kental yang dulunya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Zaman yang semakin modern tidak membuat adat istiadat itu terdegradasi, dalam pemilihan kepala daerah sosok bangsawan para keturunanan *Arung* (Raja) masih sangat mendominasi. Modal simbolik inilah merupakan salah satu faktor masih eksisnya bangsawan dalam kontestasi pilkada. Seperti yang diungkapkan Oleh Elit Politik Demokrat Kabupaten Bone, hasil wawancara dengan Andi Suaedi sebagai berikut:

Modal simbolik dengan adanya gelar andi mempunyai pengaruh besar dalam pilihan politik masyarakat, karena sejarah kerajaan bone yang sampai saat ini masih melekat pada budaya bone, jadi tak heran jika yang mempunyai gelar andi atau bangsawan selalu menjadi pemenang dalam pilkada karena memang modal simbolik itu penting di sini. (Wawancara dengan Andi Suaedi, 9 Oktober 2019 Pukul 19.30 WITA)

Terdapat 33 Raja yang telah berkuasa di Bone pada masa zaman kerajaan. Dari raja-raja tersebut bangsawan saat ini mendapat gelar simbolik sebagai keturunan para ningrat atau raja. Sejarah panjang Kabupaten Bone tentang kekuasaan kerajaan itulah yang masih diingat sampai saat ini oleh masyarakat di Kabupaten Bone. Sehingga tak heran jika sampai saat ini kekuasaan bangsawan masih berlanjut sampai pada kontestasi Pilkada di Kabupaten Bone. Andi Fashar Padjalangi sebagai keturunan bangsawan yang telah memenangkan PILKADA

dua Periode di Kabupaten Bone mengakui adanya pengaruh modal simbolik dalam kemenangannya di Kontestasi Politik. Hasil Wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi sebagai berikut :

Modal simbolik sebagai keturunan ningrat tentu saja punya pengaruh dalam pilihan masyarakat karena Bone ini bekas kekuasaan kerajaan. Daerah bone juga merupakan daerah adat. Dan tak bisa dipungkiri bahwa disini keturunan ningrat (bangsawan) berpengaruh terhadap kekuatan calon kepala daerah untuk mendapatkan hati masyarakat. (Wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi 4 Oktober 2019, Pukul 8.30 WITA)

Hal senada disampaikan oleh Andi Idris Galigo Bupati Bone 2004-2013, hasil wawancara sebagai berikut:

Bone ini daerah yang masih kental adat istiadatnya, bahkan persatuannya luar biasa, mengapa bangsawan masih eksis karena kita ini punya keturunan bangsawan dan masyarakat masih percaya bahwa bangsawan punya kapasitas buat memimpin daerah bone. (Wawancara dengan Andi Idris Galigo, 29 September 2019, Pukul 10.30 WITA)

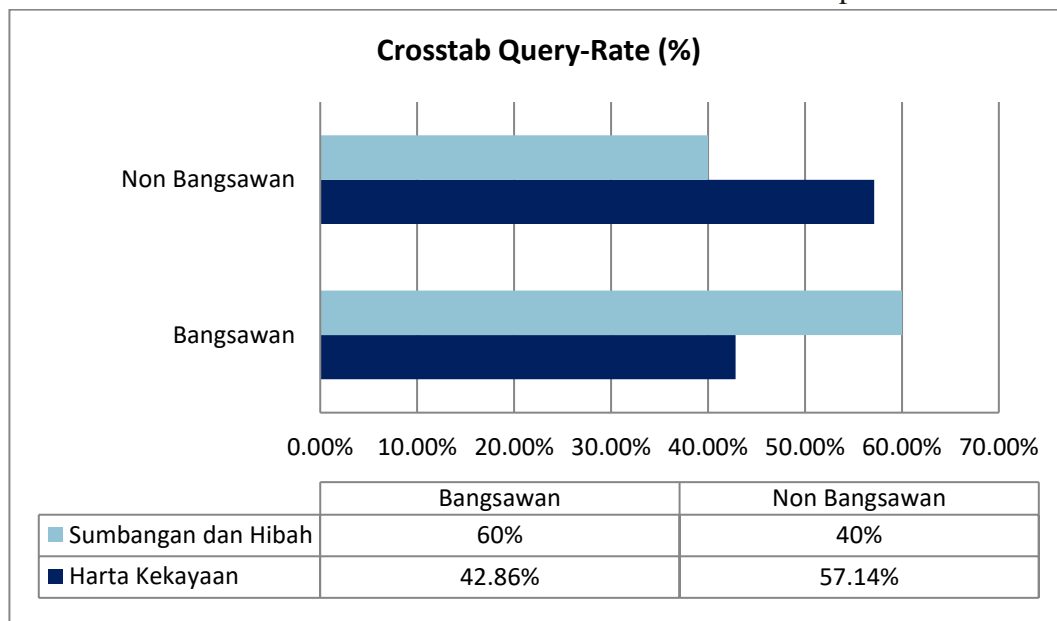
Berdasarkan hasil wawancara diatas, modal simbolik merupakan modal yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Gelar kebangsawanan yang didapatkan dari darah keturunan para raja Bone, menjadikan kepercayaan masyarakat semakin kuat dalam menentukan pilihan politik. Modal simbolik kemudian dimanfaatkan oleh para keturunan bangsawan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone.

5.3.3 Modal Ekonomi

Modal Ekonomi adalah modal yang paling banyak diandalkan dalam kontestasi politik. Modal ini adalah wujud dari kepemilikan harta yang berupa uang, ataupun benda berharga. Modal ekonomi sangat mudah diubah menjadi bahan penggerak dukungan politik, baik berupa poster, baliho, bahkan membayar

jasa iklan di media visual. Modal ekonomi juga lebih mudah untuk diukur dibanding dengan modal lainnya, karena modal ekonomi dapat dihitung dengan jumlah uang yang digunakan untuk keperluan konstestasi, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Grafik 5.10
Analisis Modal Ekonomi dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kalangan non bangsawan (dr. Umar) mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dari pada kalangan bangsawan (Andi Fashar), Meskipun pada sumbangan dan hibah bangsawan lebih besar karena hasil dari kepemimpinan Andi Fashar Padjalangi sebagai Bupati Bone. Modal ekonomi dari ukuran Harta Kekayaan adalah satu-satunya modal yang dimenangkan oleh kalangan non bangsawan (dr. Umar), sementara modal yang lainnya kalangan bangsawan jauh lebih unggul dibandingkan dengan calon non bangsawan.

Kehadiran modal ekonomi merupakan basis Marx karena mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas. Menurut Marx posisi sosial

masyarakat akan mengacu pada posisi produksi ekonomi individu. Tak bisa dipungkiri aktor politik harus punya kelas ekonomi yang tinggi jika ingin maju sebagai calon kepala daerah, semua dikarenakan biaya politik yang memang tinggi. Kontestasi Pilkada di Kabupaten Bone pada tahun 2018 hampir diikuti oleh dua calon masing-masing dari Bangsawan dan Non Bangsawan. Namun sayangnya Calon dari Non Bangsawan gugur saat verifikasi dukungan independen dari masyarakat. Padahal modal ekonomi dr. Umar paling tinggi dibanding dengan calon lain.

Tabel 5.15

Harta Kekayaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone 2018

No	Calon	Kekayaan	Partai	Keterangan
1	dr. Rizalul Umar	28.502.941.758	Independen	Non Bangsawan
2	Andi Fashar Padjalangi	13.303.232.438	Golkar	Bangsawan
3	Ambo Dalle	6.636.907.662	Golkar	Bangsawan
4	Andi Mappamadeng	2.840.000.000	Independen	Bangsawan

Sumber : KPUD Kabupaten Bone

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dr. Umar (Non Bangsawan) sebagai calon yang gugur pada saat verifikasi data jalur independen mempunyai harta kekayaan paling tinggi dibandingkan calon yang lain. Modal ini relatif paling independen dan dinamis dalam penggunaannya karena modal ekonomi dapat dengan mudah dikoneversi ke dalam modal yang lainnya di dalam arena politik. Terkait modal ekonomi dalam kontestasi pilkada, KPUD Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa jika mengacu pada modal ekonomi saja maka dr. Umar pasti menjadi pemenangnya, namun kenyataanya Maju menjadi calon saja gagal.

Hasil wawancara dengan Komisioner KPUD Bone, Andi Mappaningsong sebagai berikut :

Laporan Harta Kekayaan yang kami terima justru menempatkan dr. Umar yang paling tinggi kekayaannya, namun justru tidak lolos karena dukungan dari jalur independen tidak memenuhi syarat, selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah tentu saja kami melihat modal ekonomi itu penting, namun bukan itu yang utama karena walaupun modal ekonominya melimpah tapi dukungan dari masyarakat kurang tetap saja tidak bisa, jadi Modal ekonomi tetap harus dimiliki namun bukan yang utama dalam kontestasi, bahkan kalau perlu biaya kampanye kecil tapi justru bisa menang. (wawancara dengan Andi Mappaningsong, 4 Oktober 2019. 11.00 WITA)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa modal ekonomi dibutuhkan dalam kontestasi PILKADA, namun yang menentukan tetap hasil dari dukungan masyarakat, pernyataan yang relevan juga diungkapkan oleh Andi Fashar Padjalangi dalam Wawancara sebagai berikut :

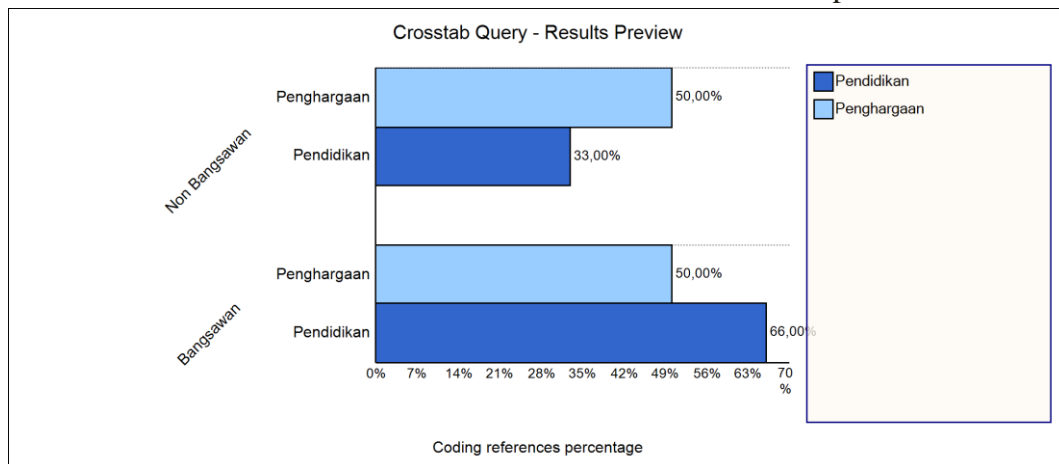
Modal ekonomi pasti sangat penting, karena segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses kampanye pasti membutuhkan dana yang besar, tetapi uang bukan segalanya, walaupun kita punya kekayaan yang melimpah tetapi tidak mendapat dukungan dari berbagai kalangan tentu saja akan susah *survive* dalam proses politik. (wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi, 4 Oktober 2019 Pukul 08.30 WITA)

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa modal ekonomi merupakan hal penting untuk digunakan dalam kontestasi PILKADA di Kabupaten Bone, Andi Fashar Padjalangi adalah sosok yang mempunyai modal ekonomi dengan Laporan Harta Kekayaan mencapai 13 Milyar. Modal ekonomi merupakan hal yang harus dimiliki oleh calon yang akan ikut dalam kontestasi, namun modal ekonomi harus diikuti oleh dukungan yang kuat dari modal yang lainnya seperti modal sosial dan modal simbolik.

5.3.4 Modal Kultural

Modal kultural merupakan dari wujud pemanfaatan informasi tentang kebudayaan dan pengetahuan seseorang yang dilihat dari strata pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Bentuk kongkret dari modal ini berupa bukti tanda telah menempuh pendidikan atau ijazah. Modal kultural digunakan untuk menampilkan kapabilitas calon untuk kelayakan memimpin suatu daerah.

Grafik 5.11
Analisis Modal Kultural dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Bone



Sumber : Analisis Coding melalui Nvivo12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa kalangan bangsawan jika dilihat dari modal cultural tetap lebih unggul yaitu dengan pendidikan yang dimiliki mendapat 66% nilai hasil analisis melalui nvivo. Sementara dari modal cultural hasil dari penghargaan akademik yang dimiliki, baik dari kalangan bangsawan dan non bangsawan sama-sama memiliki 50% persentase dari hasil analisis coding melalui nvivo hal tersebut disebabkan oleh imbangnya. Modal Kultural dari segi Pendidikan bangsawan lebih dominan karena Andi Fashar Padjalangi sebagai calon dari bangsawan mempunyai modal kultural yang memadai, tingkat pendidikan yang tinggi menjadikannya seorang yang memiliki intelektual yang

tinggi. Pendidikan mempunyai nilai tawar yang tinggi bagi masyarakat yang mengerti politik, apalagi pendidikan yang ditempuh oleh Andi Fashar yaitu ilmu sosial dan ilmu politik, sehingga pemahaman tentang kepemimpinan tidak diragukan lagi. Gelar bangsawan yang dimilikinya juga menuntutnya untuk memegang teguh adat istiadat kebudayaan Bone. Kepercayaan masyarakat tentang modal kultural yang dimiliki Andi Fashar memang tak terbantahkan, beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa sosok Andi Fashar adalah seseorang yang seakan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat/budayawan sebagai berikut :

 Semua orang tahu Andi Fashar adalah orang yang berpendidikan, dari keturunan orang hebat, bahkan anaknya (Andi Izman) kini juga ikut terjun ke dunia politik dengan pendidikan yang memang sudah matang, pak bupati juga menempuh pendidikan yang keilmuannya sesuai, di Unhas pun beliau terkenal sebagai ketua Alumni Fisipol. (wawancara dengan Andi Yushand, 30 September 2019, 11.30 WITA)

 Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan Budayawan, yaitu pemilik Museum Lapawawoi Kabupaten Bone sebagai berikut :

 Seorang keturunan ningrat, Andi Fashar tentu memiliki modal kultural, karena para keturunan bangsawan telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, sehingga tidak heran jika anak keturunan bangsawan yang dekat dengan kekuasaan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. (wawancara dengan Wawancara dengan Andi Baso Batara, Budayawan dan Pemerhati Budaya Bone, 4 September 2019 Pukul 11.30)

 Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa modal kultural merupakan salah satu faktor yang membuat Andi Fashar dapat memenangkan PILKADA dua kali berturut-turut, karena tokoh masyarakat menyatakan bahwa sosok Andi fashar yang merupakan keturunan bangsawan punya kualitas pendidikan yang sangat relevan untuk memimpin suatu daerah.

Tabel 5.16
Riwayat Pendidikan Andi Fashar Padjalangi

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	TK Matanna Tikka Watampone	1969
2	SD Neg. 11 Watampone	1974
3	SMP Neg. 6 Makassar	1977
4	SMA Neg. 5 Makassar	1981
5	Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unhas	1987
6	Program Magister Pemerintahan Daerah Unhas	2002
7	Doktor Administrasi Publik Unhas	2013

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa modal kultural Andi Fashar Padjalangi memang terbukti kuat. Sosoknya adalah Lulusan Sarjana Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unhas, kemudian dilanjutkan pada program Magister dan Doktor Pemerintahan Daerah Unhas, pendidikan yang ditempuh sangat relevan sebagai seorang kepala daerah, sehingga masyarakat tak ragu lagi untuk menempatan pilhannya kepada Andi Fashar Padjalagi. Partai Golkar sebagai partai pengusung pun meyakini bahwa riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Andi Fashar adalah salah satu modal yang menghasikan kemenangan. Hasil wawancara dengan Sekertaris Umum DPD II Partai Golkar Bone sebagai berikut:

Pendidikan itu sangat penting sebagai bukti kapabilitas seseorang, Andi Fashar mempunyai itu sebagai modal kultural, sebagai pemimpin memang harus mempunyai pendidikan sebagai bukti kualitas figur yang kita usung, golkar juga memilih figur pasti melihat kualitas calon yang salah satu ukurannya adalah tingkat pendidikan. (Wawancara dengan Firman Batari, 30 September 2019, Pukul 8.30 WITA)

Hal senada diungkapkan oleh Andi Fashar Padjalangi tentang modal kultural yang sangat penting dalam kontestasi PILKADA, hasil wawancara sebagai berikut :

Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting yang harus dimiliki, pendidikan itu sangat penting untuk bekal ilmu dalam menjalankan roda pemerintahan, baik partai dan juga masyarakat pasti mau dipimpin oleh figur yang punya kualitas pendidikan yang baik, selain kualitas pendidikan, pengaplikasian ilmu kemasyarakat juga penting agar ilmu kita berguna bagi orang banyak. (Wawancara dengan Andi Fashar Padjalangi, 4 Oktober 2019, Pukul 8.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa modal kultural yang dimiliki Andi Fashar Padjalangi punya nilai tawar yang tinggi dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone. Modal kultural berasal dari seluruh kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Andi Fashar Padjalangi, kemudian pengetahuan yang diperoleh dari warisan keluarga sebagai keturunan bangsawan. Modal kultural tersebut merepresentasikan suatu proses pembelajaran yang telah dijalani oleh Andi Fashar Padjalangi sehingga modal tersebut melekat pada figurnya dan tak mudah untuk di klaim oleh orang lain.

	<i>Capital (Modal)</i>
	Modal sosial yang dibangun oleh Andi Fashar Padjalangi secara terstruktur telah dilakukan sejak dulu, mulai dari Relasi dengan Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, dengan organisasi masyarakat, sampai dengan Pejabat dalam birokrasi.
	Modal simbolik merupakan modal yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone. Gelar kebangsawanan yang didapatkan dari darah keturunan para raja Bone, menjadikan kepercayaan masyarakat semakin kuat dalam menentukan pilihan politik kepada keturunan Bangsawan
	Modal ekonomi merupakan hal penting untuk digunakan dalam kontestasi PILKADA di Kabupaten Bone, Andi Fashar Padjalangi adalah sosok yang mempunyai modal ekonomi dengan Laporan Harta Kekayaan mencapai 13

	Milyar. modal ekonomi merupakan hal yang harus dimiliki oleh calon yang akan ikut dalam kontestasi, namun harus diikuti oleh dukungan yang kuat dari modal yang lainnya seperti modal sosial dan modal simbolik.
	Modal kultural yang dimiliki Andi Fashar Padjalangi punya nilai tawar yang tinggi dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone. Modal kultural berasal dari seluruh kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Andi Fashar Padjalangi serta pengetahuan yang diperoleh dari warisan keluarga sebagai keturunan bangsawan.